

Nama : Cindi Yosari Saragih
NPM : 2213031084
Matkul : Ekonomi Industri
Kelas : 2022C

CASE STUDY

1. Dampak Transformasi Digital terhadap Struktur, Produktivitas, dan Ketimpangan

Transformasi digital dalam industri Indonesia membawa perubahan mendasar terhadap struktur, produktivitas, dan tingkat ketimpangan antar pelaku usaha. Dengan menggunakan kerangka *Technology Adoption Curve*, terlihat bahwa industri besar berada pada kelompok *early adopters* dan bahkan sudah bergerak menuju tahap *early majority* dalam pemanfaatan teknologi seperti IoT, AI, dan big data. Hal ini membuat struktur industri semakin terpolarisasi, di mana perusahaan besar mendominasi inovasi dan produksi berbasis digital, sementara UMKM masih tertinggal di tahap *laggards*. Dari perspektif *Schumpeterian Innovation*, adopsi teknologi digital memang meningkatkan produktivitas melalui proses *creative destruction*, yakni menggantikan metode lama dengan sistem yang lebih efisien. Namun, proses ini juga menimbulkan ketimpangan karena keuntungan produktivitas terkonsentrasi pada perusahaan besar, sedangkan UMKM yang belum siap justru menghadapi risiko semakin tersingkir. Selain itu, otomatisasi berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, sehingga menambah dimensi ketimpangan sosial dan ekonomi yang harus diantisipasi.

2. Evaluasi Peran Kebijakan Publik

Kebijakan publik melalui program Making Indonesia 4.0 dan Peta Jalan Digitalisasi Industri Nasional menjadi fondasi penting untuk mendorong transformasi digital. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan arah strategis, insentif investasi, serta dukungan kolaborasi antara industri dan startup teknologi. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal inklusivitas. Infrastruktur digital belum merata, akses pembiayaan bagi UMKM terbatas, dan kapasitas SDM di banyak daerah masih rendah. Sementara kebijakan insentif lebih banyak dirasakan oleh perusahaan besar, UMKM justru kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Dalam konteks disrupsi tenaga kerja, kebijakan pemerintah terkait reskilling dan upskilling masih relatif terbatas skalanya, sehingga belum mampu menjawab potensi hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi. Dengan demikian, meski kebijakan publik telah mengarah pada transformasi digital, implementasinya masih belum cukup komprehensif untuk menutup kesenjangan digital dan memastikan keberlanjutan sosial-ekonomi.

3. Strategi Transformasi Digital yang Inklusif dan Kontekstual

Agar transformasi digital industri di Indonesia dapat berlangsung lebih inklusif, strategi yang dirancang harus mempertimbangkan perbedaan kapasitas antara industri besar dan UMKM. Pertama, pemerintah perlu memperkuat ekosistem digital melalui penyediaan infrastruktur yang lebih merata, terutama jaringan internet berkualitas di wilayah industri kecil dan menengah. Kedua, program pembiayaan inklusif seperti subsidi adopsi teknologi, insentif pajak, dan skema kredit lunak harus ditargetkan secara khusus untuk UMKM agar mereka mampu mengakses perangkat digital. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan vokasi, kerja sama dengan perguruan tinggi, serta platform *e-learning* harus diperluas untuk menciptakan tenaga

kerja yang siap menghadapi era digital. Terakhir, strategi ini juga perlu menekankan kolaborasi antara perusahaan besar dan UMKM, misalnya melalui kemitraan rantai pasok digital yang memungkinkan transfer teknologi dan keterampilan. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital tidak hanya memperkuat daya saing industri besar, tetapi juga mengangkat UMKM sehingga kesenjangan industri dapat dipersempit, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.